

SARASEHAN NASIONAL ANTROPOLOGI 2010¹

“Re-invensi Antropologi Indonesia di Era
Demokrasi dan Globalisasi”

Cisarua, 21-23 Juli 2010

SEMINAR ANTROPOLOGI TERAPAN

“Antropologi dalam Lintasan Pembangunan
Indonesia”

Posisi Antropologi Dalam Studi Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Ninuk Kleden-Probonegoro



¹ Copyright of Forum Kajian Antropologi Indonesia, 2010. This publication is a copyright and remains the intellectual property of Forum Kajian Antropologi Indonesia and its writer. No part of it may be reproduced by any means without prior written permission of Forum Kajian Antropologi Indonesia and the writer

Posisi Antropologi Dalam Studi Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat²

Ninuk Kleden-Probonegoro

1. Mengapa Studi Antropologi untuk Mengatasi Kemiskinan?

Kemiskinan sudah sejak lama merupakan persoalan yang dijadikan isu negara. Bahkan sebenarnya sejak republik ini belum berdiri, menurut data sejarah sejak jaman Majapahit, Mataram, masa colonial, masa Jepang, telah dikenal kemiskinan dan orang miskin. Hanya saja tentu dalam ujud dan penyebab yang berbeda dari satu masa ke masa yang lain. Akhir-akhir ini, *Kompas* (Senin, 12 Juli 2010) menurunkan berita utama berjudul “Kemiskinan Kian Merisaukan – Kenaikan Tarif Dasar Listrik Menambah Beban Buruh, Petani dan Nelayan”. Angka-angka yang menyertainya pun cukup menakjubkan. Selanjutnya *Kompas* menyitir data dari BPS bahwa penduduk miskin pada bulan Maret 2010 mencapai 31.02 juta orang atau 13.33%, dan pengamat ekonomi Faisal Basri menyebutkan bahwa dalam 15 tahun terakhir ini angka kemiskinan absolut turun dari 17.7% pada tahun 1996 menjadi 13.33% pada tahun 2010. Kemiskinan yang tercatat dalam sejarah tetap menghantui dan menjadi persoalan kita. Patut diketahui bahwa makalah ini akan membicarakan pentingnya studi antropologi dalam konteks kemiskinan. Penelitian yang diambil sebagai kasus persoalan ini dilakukan di Kecamatan Samigaluh, Kulonprogo.

Negara telah melakukan berbagai cara melalui program dan kebijakan untuk menanggulangi (istilah yang digunakan tepatnya mengentaskan) kemiskinan itu. Meskipun demikian, tampaknya segala usaha itu belum memperlihatkan hasilnya, bahkan jumlah orang miskin tampak selalu bertambah, dan semakin banyak sejak krisis moneter tahun 1997 sampai saat ini. Kalau pada periode 1976-1996 (20 tahun, Repelita I sampai V) angka kemiskinan di Indonesia turun drastis dari 40% menjadi 11%,³ maka pada masa krisis moneter 1997-1998 angka kemiskinan menjadi 14% di tahun 1998, dan melonjak kembali sebesar 16,58% pada tahun 2007 (BPS, Maret 2007).⁴

Melihat kenyataan itu, pemerintah sebenarnya tidak berdiam diri saja. Dalam lintasan sejarah, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Pada tahun 1960-an, telah dikeluarkan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Kebijakan ini tertuang dalam Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun (Penasbede) tahap pertama 1961-1969 (MPRS dan Departemen Penerangan 1960:49). Sayangnya, program Penasbede berhenti di tengah jalan karena situasi politik pada tahun 1965.

² Makalah yang disampaikan dalam Sarasehan Nasional Antropologi di Cisarua pada tgl. 21-23 Juli 2010.

Pengenalan terhadap persoalan kemiskinan dilakukan melalui penelitian kemiskinan yang merupakan bagian dari Riset Kompetitif LIPI Bidang VII, sub program “*Critical and Strategic Social Issues*”

³ Pernyataan ini adalah laporan resmi BPS tahun 2000. Persentase ini dianggap indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di zaman Orde Baru.

⁴ Angka 16.58% masih banyak diperdebatkan. Beberapa lembaga survey dan surat kabar nasional seperti Kompas (Mei 2008), Republika (Juni 2008) dan Jawa Pos (Mei 2008) kerap menyatakan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 24%, dengan populasi orang miskin mencapai jumlah 42-60 juta orang.

Setelah stabilitas nasional pada Repelita I di tahun 1970-an dianggap solid, saat itu pemerintah kembali memikirkan program kesejahteraan rakyat. Kebijakan pengentasan kemiskinan baru terasa gaungnya pada akhir Pelita V (1988-1993) dan awal Pelita VI (1993-1998), yaitu saat pemerintah melakukan strategi khusus untuk menuntaskan masalah kesenjangan sosial-ekonomi melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program IDT diluncurkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 1993 sebagai jawaban atas persoalan yang diajukan Mubarto pada tahun 1988-1990-an. Dapat dikatakan bahwa program IDT merupakan kebijakan spektakuler pemerintah yang paling berhasil dan mampu menurunkan angka kemiskinan. Sebagaimana halnya program Penasbede, program IDT pun gagal akibat krisis ekonomi dan politik yang menerpa Indonesia di tahun 1997-1998. Dampak krisis yang lebih buruk untuk sementara dapat diatasi pemerintah melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) berdasarkan Keppres No. 190 Tahun 1998, yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Pelaksanaan berbagai kebijakan memperlihatkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dianggap belum mencapai harapan, bahkan tampak semakin parah. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah melalui Kepres No. 124 Tahun 2001 *junto* No. 34 dan No. 8 Tahun 2002 membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang berfungsi sebagai koordinator dalam melakukan perencanaan, pembinaan, pemantauan dan pelaporan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, pada tanggal 10 September 2005 dikeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). TKPK diharapkan berperan memantapkan hasil yang telah dicapai oleh KPK dalam tugasnya membuat langkah-langkah kongkret untuk mempercepat pengurangan masyarakat miskin.

Dalam pelaksanaannya, TKPK mendorong pelaksanaan berbagai bentuk program pengentasan kemiskinan. Jaringan antar departemen dan mitra kerja semakin diperkuat, dengan insentif pendanaan yang cukup besar, yaitu 38% dari APBN untuk lintas departemen. Dana ini kemudian digulirkan ke dalam program P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil), KUBE (Kelompok Usaha Bersama), TPSP-KUD (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa), UEDSP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam), PKT (Pengembangan Kawasan Terpadu), IDT (Inpres Desa Tertinggal) di beberapa pedesaan yang dianggap skala prioritas, P3DT (Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal), PPK (Program Pengembangan Kecamatan), P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi), P2MPD (Proyek Pembangunan Masyarakat dan Pemerintah Daerah), Asuransi Kesehatan untuk Orang Miskin (Aseskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Saluran Langsung Tunai (SLT).

Selain program yang dilaksanakan secara lintas departemen di atas, program penanggulangan kemiskinan juga dilakukan dalam koordinasi Bank Indonesia melalui berbagai program keuangan mikro bersama Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan milik masyarakat, seperti LDKP (Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan), KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), dan juga bekerjasama dengan BUMN (Lembaga Usaha Milik Negara) maupun milik swasta atas inisiatif kelembagaannya sendiri. Dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, baik departemen maupun lembaga lain kerap bekerjasama dengan mitra kerja di tingkat lokal seperti LSM, paguyuban, serta kelompok-kelompok profesi. Sayangnya ada dua hal yang menyebabkan kegagalan program di tingkat lokal, yaitu: i) kebocoran dana, dan ii) tidak tepat sasaran dan salah pendekatan saat implementasi program (UNDP, 2007).

Uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa UNDP (2007) telah menjawab kegagalan program yang menyangkut kebocoran dana, tidak tepat sasaran, dan salah pendekatan. Persoalan menjadi tampak sederhana apabila pemerintah menutup dana yang bocor, kemudian diusahakan program tepat sasaran dan jangan salah pendekatan. Sayangnya, seperti telah disebutkan, bahwa daerah dan orang miskin justru semakin bertambah banyak.

Berbagai bentuk program pengentasan kemiskinan di atas adalah strategi dari kebijakan yang digulirkan oleh kementerian terkait. Kebijakan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2008 misalnya, berusaha mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah yang memiliki indikator “tertinggal, terbatas, dan tidak mampu” pada aspek ekonomi, sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, kemampuan fiskal, dan aksesibilitas.⁵ Apa yang hendak dikatakan di sini adalah bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan dari berbagai tingkat tataran yang diterapkan melalui strategi tertentu, seolah-olah tidak memberikan peningkatan kesejahteraan. Dalam hal ini persoalan kemiskinan banyak dikaji dari sudut perspektif struktural. Kalau perspektif struktural yang logis dan obyektif, belum berhasil mengentaskan kemiskinan, maka disiplin Antropologi diharap dapat membantu dengan menekankan aspek nilai-nilai budaya yang dapat memengaruhi perilaku ekonomi, khususnya yang mengganggu kemiskinan sebagai suatu masalah yang dapat dan perlu di atasi.

Perspektif kebudayaan ini dianggap penting karena; *pertama*, selama ini kemiskinan didekati secara struktural, baik ekonomi maupun politik, tetapi belum pernah ditemui adanya pendekatan kebudayaan.⁶ *Kedua*, pendekatan kebudayaan dalam penelitian ini memperlihatkan konsep kemiskinan dari sudut pelaku yang pada gilirannya dapat membantu memberikan wawasan dan mengurangi salah sasaran saat program dan kebijakan kemiskinan itu dibuat.

Ada lima hal yang akan dibicarakan untuk dapat mengerti posisi Antropologi dalam studi kemiskinan ini. (i) Terlebih dahulu harus diketahui siapakah yang dimaksud dengan orang miskin itu, (ii) orientasi hidup perlu pula diketahui karena berhubungan dengan perilaku, (iii) peran lembaga tradisi tidak dapat ditinggalkan, karena orang miskin yang dibicarakan di sini ada dalam masyarakat pedesaan yang boleh dikata masih dalam satu komunitas etnis yang erat hubungannya dengan lembaga tradisional. (iv) Perilaku ekonomi diharapkan dapat membebaskan orang dari kemiskinan, (v) perlu diketahui sikap masyarakat terhadap program pengentasan kemiskinan. Ke lima hal tersebut dapat menghantar kita untuk dapat memahami Antropologi yang mempelajari kemiskinan.

2. Daerah Miskin, Kemiskinan dan Orang Miskin ? : Kasus Samigaluh

Persoalannya di sini, apakah selalu harus terjadi korelasi antara daerah, kemiskinan dan orang miskin? Untuk dapat menjawabnya, patut diketahui bahwa Samigaluh diambil sebagai daerah penelitian, karena didasarkan pada kriteria daerah miskin yang diterbitkan oleh Kementerian daerah tertinggal dan menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi matapencaharian, sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan), infrastruktur (meliputi jalan, air dan pemukiman), fiscal (sertifikat tanah dan pasar), karakter daerah. Jadi, saat kami

⁵Indikator pada aspek-aspek tersebut ditetapkan berdasarkan survei ekonomi dan kependudukan. Seperti halnya pandangan Masri Singarimbun, Mubyarto, dan Sayogyo bahwa pemetaan wilayah, jumlah, dan penduduk miskin merupakan ujung tombak dari program kebijakan pengentasan kemiskinan.

⁶ Parsudi Suparlan (1984) pernah meneliti gelandangan di masyarakat perkotaan yang sebenarnya adalah migran dari desa. Urbanisasi yang dilakukan pada umumnya adalah memang karena kesulitan ekonomi yang akarnya ada di desa. Tjetjep Rohendi Rohidi (2000), menulis tentang *Ekspresi Seni Orang Miskin; Adaptasi Simbolik Terhadap Kemiskinan*, tetapi konsep kemiskinan diadopsinya dari Oscar Lewis yang dimodifikasi dengan pemikiran Suparlan, sehingga baik konsep maupun teori yang digunakan tidak relevan untuk digunakan di sini.

masuk ke Samigaluh, terbayang daerah kumuh, banyak anak tidak sekolah, penyakit, tidak ada jalan walaupun ada tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, kotor, kumuh dst.

Tetapi apa yang terjadi? Saat itu bulan April 2009. Udara sejuk pegunungan menerpa kami, alamnya hijau, beberapa petak sawah yang kami lalui juga hijau. Anak-anak dengan seragam putih merah (SD) berjalan meninggalkan sekolah, benar kata orang rumahnya di atas bukit-bukit yang harus ditempuh dengan berjalan kaki, sekolahnya pun tampak rapi. Daerah itu jauh dari bayangan saya tentang kemiskinan. Kata orang, kalau mau lihat Samigaluh dalam keadaan miskin, artinya daerah kering dengan pohon-pohon yang meranggas dan air yang sulit sehingga dapat dilihat ibu-ibu yang berjalan naik-turun bukit membawa air, pada bulan Agustus ke atas, saat kemarau di sana. Apa ini berarti bahwa di Samigaluh telah terjadi kemiskinan yang bersifat sporadis dan miskin hanya muncul pada musim kemarau saja?

Kalau kita membicarakan orang miskin, tentu ada pihak yang tidak miskin, orang kaya (karena tidak dikenal istilah orang pas-pasan). Ada berbagai pandangan tentang orang kaya dan kekayaan, serta orang miskin dan kemiskinan. Pak Mujiyono, seorang sesepuh Desa Sidoharjo yang tinggal di Dukuh Nungkep, mengatakan bahwa orang kaya adalah mereka yang mempunyai lahan di tempat yang subur dengan pengairan yang baik, dan masih bekerja di tempat lain. Jadi, tidak semata-mata bertani saja. Informan, dan juga banyak orang lain, yang menganggap bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk mereka yang hidupnya enak, mereka termasuk orang-orang yang *ngglenter*, yang kebutuhannya selalu tercukupi. Sedangkan mereka yang kurang mampu, *mboten gadah*, adalah orang-orang yang *ajangnya* cuma sedikit ; hanya memiliki tanah yang sempit dan menempati lahan yang kurang subur, dengan pola penggarapan tanah yang tidak penuh, banyak *disambi*. Konsep yang banyak dipakai untuk menyebut matapencaharian ini adalah *glidik*.

Mboten gadah, secara harafiah adalah orang yang tidak berpunya. Ada juga istilah lain yang merujuk tentang kondisi kemiskinan, misalnya *tiang alit* yang secara harafiah berarti orang kecil. Istilah *tiang alit* dalam arti etik terjadi karena adanya kelompok yang tidak *alit* dalam hal ini adalah para bangsawan. Meskipun demikian, dalam wawancara di lapangan informan sering menyebutkan diri mereka sebagai *tiang alit* meskipun tidak dalam hubungannya dengan bangsawan. Di Samigaluh seandainya seorang bangsawan sudah menjadi orang yang tidak berpunya, ia tidak akan menyebut dirinya sebagai *tiang alit* meskipun sebenarnya ia juga sudah menjadi *mboten gadah*. Oleh sebab itu, *tiang alit* dalam tulisan ini, mempunyai makna yang setara dengan *mboten gadah*.

Dua Kasus *Mboten Gadah*

Beberapa kasus *mboten gadah* yang dikemukakan secara singkat berikut ini, diharapkan dapat memperlihatkan siapa mereka

Widi Marsuki

Widi Marsuki, tinggal di Pedukuhan Wonogiri, Desa Sidoharjo, bersama seorang istri dan seorang cucu yang ibunya meninggal. Ayah anak itu bekerja di tempat lain. Ia penerima BLT dan Raskin, meskipun mempunyai tanah hak milik seluas 1 ha yang diterima sebagai waris dari *Pakde* yang tidak mempunyai anak. Rumahnya berdinding gedek dan berlantai tanah, tetapi di sana terdapat sebuah televisi baru, pemberian besan untuk menyenangkan cucu.

Penghasilan yang diterima pak Widi dari sebagian tanahnya yang ditanami kopi, sisanya mahoni, jati dan waru. Dalam waktu satu tahun, ia bisa 4 kali memetik kopi yang menghasilkan 10 kg kopi basah yang bisa menjadi 2 kg kopi kering. Selain itu ia juga mengolah tanah *bengkok* pamong yang bisa menghasilkan gabah basah. Cengkehnya hanya 10 pohon, tetapi hasilnya bisa

digunakan untuk membayar hutang. Saat paceklik ia sering pinjam ke bank yang akan dibayarkan kembali dengan hasil cengkeh ini. Selain itu pak Widi Marsuki juga masih bisa menjual kayu bakar yang diambil dari tanahnya yang luas itu.

Keprigelan sebagai tukang kayu adalah anugerah yang dimilikinya. Ia dapat mengerjakan rumah, membuat kusen dengan sangat baik. Menariknya, informan ini hanya mau bekerja di pedukuhannya sendiri saja, meskipun tidak ada uangnya. Alasan yang diberikannya, karena ia hanya mau menolong saja, “*wegah* kerja di desa orang”, demikian katanya. Sebenarnya ia bisa menghasilkan uang lebih, karena suatu saat ia *kepepet*, dan bekerja di Medan sebagai tukang kayu, bisa memperoleh Rp.3.000.000. Uang itu digunakan untuk membayar hutang. Setelah hutangnya terbayar, ia kembali kerja di kampungnya sendiri, tanpa penghasilan dan hanya menerima makan-minum saja selama kerja.

Menurutnya, ia kerja baik karena hasil kerjanya rapi, terbukti orang sering minta ia bekerja pada mereka. Pernah pada saat gempa bumi menghantam Bantul dan sekitarnya beberapa saat yang lalu, ia diminta membuat rumah sebagai pengganti rumah-rumah yang roboh. Ia bekerja sepenuh hati, tetapi tidak mau dibayar. Katanya, ia senang kalau pergi ke mana-mana akan aman, dan selalu dipersilahkan mampir dan menginap.

Wardio

Kalau Widi Marsuki beranggapan bahwa kerja yang baik menghasilkan sesuatu yang baik, meskipun tanpa dibayar, maka berbeda halnya dengan Wardio yang tinggal di Pedukuhan Klendrekan, Banjarsari. Ia tinggal di rumah kayu tua dengan lantai tanah. Pak Wardio seperti juga halnya Widi Marsuki, adalah penerima PKH dan tentunya juga BLT dan Raskin. Anggota keluarganya ada enam orang; suami-istri dan 4 org anak. dua anak laki2 (20 dan 18 thn.). Anak laki-laki sulungnya sudah tamat SMEA Bopkri, tetapi kerjanya merumpuk karena tidak ada kerja lain, adiknya juga membantu urusan rumah tangga saja, dan dua adik perempuan yang masih duduk di bangku SMP dan SD tentu saja belum bekerja. Saat si sulung lulus, Widi Marsuki mengijonkan pohon jatinya. Informan adalah buruh tani yang paling banyak bisa memproduksi 2 karung gabah basah. Ladang yang diterimanya sebagai warisan dengan luas 2000m2 ditanami kapulaga, laos, temulawak dan sebagainya, tanaman *empon-empon*, selain juga jati.

Pak Wardio beranggapan bahwa pekerjaan yang dilarang oleh norma masyarakat yang berlaku, misalnya mengambil kayu di kebun orang, itu tidak apa-apa. Seperti kita ketahui bahwa aturan di daerah penelitian, kayu bakar maupun *glondongan*, hanya boleh diambil di tanah sendiri. Jadi, sikap pak Wardio yang mengambil kayu di tanah orang, sebenarnya menyalahi norma setempat, meskipun demikian baginya kayu yang dapat dijadikan uang itu lebih penting daripada segalanya, juga di atas norma pencurian.

Apa yang hendak dikatakan dengan kedua informan itu adalah, bahwa Widi Marsuki memilih kerja dengan hasil yang **baik**, sedangkan Wardio mementingkan hasil yang **banyak**. Menurut hemat kami, hal ini disebabkan karena Widi Marsuki sebenarnya didukung oleh kondisi ekonominya yang dibantu oleh *keprigelan*, sedangkan Wardio yang dimiliki hanya kekurangannya. Wawancara memperlihatkan bahwa kebanyakan penduduk daerah penelitian menganut pemikiran pak Wardio, perilaku ekonomi menuntut hasil yang banyak.

Memahami Orang Miskin

Langkah awal untuk memahami orang miskin adalah anggapan mereka tentang diri dan tentang kemiskinan itu sendiri. Konsep diri ini tidak mudah untuk ditemukan, karena menyangkut masalah bagaimana seseorang memandang dunianya, bagaimana orang lain memandang orang miskin itu, belum lagi apabila konsep miskin ini dihadapkan dengan konsep formal rajutan negara. Kasus Widi Marsuki dan Wardio adalah contoh tentang perbedaan pandangan terhadap

perilaku kemiskinan yang berhubungan dengan pekerjaan, yang juga berhubungan dengan hutang (termasuk ijon). Akibatnya, banyak tafsir dalam mengartikulasikan kemiskinan.

Katakan lah, bila seseorang berada dalam komunitasnya, ia dapat mengatakan “tidak miskin”, walaupun ekonominya dalam kondisi sulit. Seperti yang terjadi pada masyarakat desa Kebonharjo. Ada beberapa titik irigasi di desa itu, sehingga beberapa petak sawah – biasanya milik *petinggi* dan keturunan serta kerabatnya – bisa dipanen dua atau bahkan tiga kali setahun. Meskipun demikian, kebanyakan lahan juga jauh dari irigasi, dan desa ini adalah penerima BLT dan Raskin tertinggi di seluruh kecamatan Samigaluh, dan masuk sebagai masyarakat pra sejahtera tertinggi pula. Yang mengangumkan adalah, bahwa desa yang cukup terpencil, dikelilingi perbukitan dan oleh pemerintah dikategorikan sebagai desa miskin, ternyata tidak ada warganya yang bekerja sebagai penggarap atau buruh tani (bandingkan dengan Dusun Sultur, di Desa Sidoharjo, yang hampir semua penduduknya adalah buruh tani). Masyarakat desa dalam kondisi seperti ini lah yang menganggap diri “tidak miskin”, “*cekap mawon*”, kata salah seorang informan.

Akan tetapi, cerita lain akan terjadi saat ada pegawai yang datang untuk mendata penerima program bantuan untuk orang miskin. Pak Dukuh Sumoroto di Desa Sidoharjo, mengutamakan orang tua yang janda dan duda, kemudian pegawai pendata yang dari BPS itu baru melihat lantai tanah, dinding bilik, luas kepemilikan lahan dan jumlah hewan peliharaan, untuk dijadikan kategori orang miskin yang perlu mendapat bantuan program pengentasan kemiskinan itu. Yang kami lihat, kategori miskin ciptaan BPS tidak selalu dapat dibenarkan. Kondisi rumah penduduk rata-rata sama, satu-dua memang ada yang rumahnya berlantaikan tanah, tetapi ia memiliki tanah 1 ha dan di pedukuhan lain adalah biasa kalau seseorang memiliki 2 ha. Jadi, kondisi luas tanah itu tidak selamanya benar karena lahan yang luas itu terletak *diperengan* dan tidak dapat dimanfaatkan. Di Desa Sidoharjo bagian barat, *perengan* adalah tempat tinggal kera – hama kera telah bertahun-tahun dan belum dapat diselesaikan – yang merusak segala macam tanaman terutama yang tumbuh *diperengan*. Bahkan pohon kayu jati dan sengon dijadikan tempat bermain. Mereka dengan lahan luas seperti itu, rumah berlantai tanah dengan dinding bilik dan memelihara hewan cukup banyak (karena ikut sistem *nggaduh*), menyebut diri *mboten gadah* sejauh berurusan dengan program pengentasan.

Artikulasi seperti ini cukup penting karena dapat menyangkut status seseorang yang diperlukan dalam kehidupan kebudayaan. Orang selalu mengatakan bahwa orang desa itu sama, tidak ada yang kaya dan tidak ada yang miskin, kecuali PNS yang hidupnya lebih enak. Akan tetapi saat seseorang dihadapkan dengan konsep formal ciptaan negara, seperti BLT dan Raskin, seorang individu tidak pernah menolak meskipun dimasukkan dalam kategori orang miskin atau rumah tangga miskin, misalnya. Bahkan mereka yang tidak dimasukkan dalam kategori tersebut, tetap akan mempertanyakan mengapa dirinya tidak disebut miskin padahal tidak lebih kaya dari tetangganya penerima BLT dan Raskin. Dengan kata lain, kategori *mboten gadah* seringkali diekspresikan dalam bentuk identitas sebagai penerima BLT, Raskin, Jamsesnas, dan program pengentasan kemiskinan yang lain.

3. Orientasi *Negoro* dan Matapencaharian Non-Pertanian

Seperti telah dikatakan sebelumnya, bahwa orientasi dapat menentukan perilaku termasuk perilaku ekonomi. Apabila *negoro* berarti tanah, dan orientasi pada *negoro* tentunya menyangkut semua perilaku yang berhubungan dengan tanah secara khusus adalah perilaku ekonomi. Masyarakat Samigaluh tidak dapat dilepaskan dari tanah, umumnya mereka menyebut diri sebagai petani (tani). Para *petinggi* yang mempunyai tanah *lungguh* atau kerabatnya yang

mengelola sawah lahan warisan, meskipun tidak langsung menyebut diri sebagai tani, tetapi juga berhubungan dengan tanah. Ditinjau dari sudut pandang ini, sawah dapat dianggap sebagai pusat kegiatan, meskipun orang hanya panen 1x/thn.

Mata pencaharian yang termasuk sektor pertanian adalah pembuatan gula Jawa (gula aren dan gula kelapa), serta penanaman *mpon-mpon*, dan di sektor non-pertanian ada pembuatan *slondok* (jenis *cemilan*), *geblek* dan pembuatan tempe. Mereka yang bekerja *glidik* (kuli serabutan), maupun mereka yang bekerja di sektor non-pertanian, tidak meninggalkan lahan yang dimilikinya.

Topografi ini membuat lereng mempunyai kondisi sosial yang berhubungan dengan sulitnya akses yang menghubungkan satu pedukuhan dengan pedukuhan lain (khususnya di desa Kebonharjo), beberapa pedukuhan masyarakatnya mempunyai kesulitan untuk ke luar daerah pedukuhannya, juga tidak mudah untuk menuju ke kecamatan. Kondisi ini berhubungan pula dengan faktor ekonomi. Ciri lain daerah dengan tipe lereng dan lembah adalah religi formal memperoleh warnanya sendiri, dan suburnya kepercayaan terhadap alam supernatural.

Akses yang sulit ini menyebabkan misalnya pak Wagiran di pedukuhan Jumblangan, Sidoharjo, beberapa tahun lalu saat ia belum menjadi kepala dukuh, memperbaiki rumah, dan mengganti dinding gedek dengan bata. Akses jalan menuju rumahnya yang terletak di bagian lereng, tidak ada. Oleh karena itu, istri pak Wagiran menggondong batu-bata turun ke lokasi pembangunan, dan dengan sabar sedikit demi sedikit terkumpulah batu-bata untuk membangun rumah. Saat penelitian dilakukan, masyarakat Jumblangan sedang membangun jembatan bantuan PU. Hal yang sama masih dilakukan masyarakat, memikul kerikil dan semen ke tempat pembangunan jembatan itu, mirip bu Wagiran, menggondong batu-bata.

Dengan demikian, dapat diasumsikan adanya hubungan topografi dengan kondisi ekonomi yang dapat direpresentasikan dari jenis pekerjaan utama mereka yang petani, kebun atau sawah, yang pada musim panen orang akan *derep* atau *glidik* ke Nanggulan, Kenteng dan Dekso di mana daerahnya datar, dan panen bisa mencapai dua kali setahun.

Orientasi pada *negoro* juga menyangkut upacara yang berhubungan dengan air. Upacara dilakukan apabila air berhenti mengalir atau orang hendak memasang slang. Upacara dilakukan guna menghormati dan minta ijin supaya diberi air, pada pemiliknya yaitu Nabi Suleman. Syarat upacara sehubungan dengan air ini, adalah *tumpeng robyong*. Doa dalam bahasa Jawa dilakukan di sumber mata air. Selain itu ada upacara bersih dusun, khusus di Banjarsari, bersih dusun dilanjutkan ke tingkat bersih desa

4. Lembaga Tradisi dan Subsistensi

Lembaga tradisi adalah (i) produk kebudayaan (ii) yang terbentuk dari hasil interaksi di antara anggota komunitas, dengan tujuan membuat orang dapat bertahan terhadap ancaman kemiskinan dengan memberi keamanan dan perlindungan dalam hubungan-hubungan sosial yang dilembagakan.

Lembaga tradisi seperti juga lembaga-lembaga kebudayaan lain, selalu mengandung ambivalensi dalam dirinya. Suatu lembaga dapat digunakan sesuai dengan tujuannya, tetapi dapat juga diselewengkan dari tujuannya. Adanya sebuah lembaga tidak dengan sendirinya menjamin bahwa tujuan lembaga itu terlaksana dan tercapai. Tampaknya lembaga tradisi diadakan untuk dapat membantu warganya memberi keamanan dan menolong para *mboten gadah* agar mendapatkan cara untuk menyelamatkan hidupnya secara fisik dan secara sosial.

Dengan beberapa teknik yang dikembangkan dalam tradisi, kelompok *mboten gadah* diberi kesempatan untuk mendapat bagian dalam penghasilan masyarakat. Teknik-teknik sosial ini dapat berupa investasi bersama (*jimpitan, urunan*), bentuk kredit oleh masyarakat (simpan pinjam), tabungan berkala (*arisan*), bantuan untuk keadaan darurat dan *relief service (urunan)*, dan kesempatan kerja (*employment*) dalam bentuk *glidik* yaitu menjual tenaga kerja dalam sektor pertanian dan non- pertanian, baik sebagai pengisi waktu menunggu saat panen, maupun sebagai kerja yang dijalankan secara tetap.

Di lain pihak, lembaga tradisi dapat pula diselewengkan dari tujuannya oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan lain. Penyelewengan itu dapat berbentuk *money lending* yaitu hutang, dalam bentuk *ijon*, maupun dalam bentuk simpan-pinjam. Kalau peminjaman awal dapat dianggap menyelamatkan, maka pinjaman-pinjaman berikut justru dapat menjerat

Selain menyelamatkan *mboten gadah* dalam komunitasnya, beberapa lembaga tradisi juga bertujuan menyelamatkan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya alam. air merupakan sumber daya alam yang langka. Di Samigaluh upaya lembaga tradisi untuk menyelamatkan air dilaksanakan melalui upacara di mata air, khususnya yang merupakan “telapak Wali”. Jelas bahwa upacara seperti ini sulit dibuktikan dampaknya secara langsung terhadap *sustainability* air. Akan tetapi dapat dipastikan bahwa upacara ini memberikan kesadaran kepada masyarakat setempat tentang kedudukan air sebagai sumber daya yang harus dijaga dan kesadaran ini kemudian dapat dikembangkan dalam program-program yang lebih diformalkan dalam kebijakan pemerintah.

Di masa lalu lembaga tradisi berusaha juga untuk melakukan penyelamatan hutan melalui konservasi dalam bentuk *Sultan grond* dan *Pakualaman grond* yaitu kawasan hutan milik Sultan yang tidak boleh ditebang. Sekarang praktek ini sudah tidak berlaku lagi, dan tanah sudah dimanfaatkan, misalnya untuk upacara satu *Suro (Suran)*. Demi keperluan konservasi hutan kesadaran tentang adanya kawasan hutan lindung dan hutan bakau di Kaliori, perlu dihidupkan kembali dan mendapat urgensi baru dengan munculnya persoalan perubahan iklim global.

5. Perilaku Ekonomi yang Diharapkan Dapat Membebaskan Orang Dari Kemiskinan

Diduga bahwa perilaku ekonomi tertentu dapat membebaskan orang dari kemiskinan. Karl Polanyi (dalam Granovetter, 1992: 29-52) melihat ada dua bentuk ekonomi, yaitu ekonomi yang *disembedded* dan ekonomi yang *embedded* dalam kebudayaan. Kalau perilaku yang *disembedded* adalah anggapan umum (*mainstream*) tentang ekonomi formal yang berhubungan erat dengan mekanisme pasar, yang menggunakan logika formal dan pertumbuhannya dapat dihitung berdasarkan *income* per kapita, maka ekonomi yang *embedded* dalam kebudayaan mementingkan hubungan personal di antara para anggota kelompok kebudayaan yang diekspresikan dalam interaksi sosial mereka daripada mekanisme pasar.⁷ Dalam arti ini, perilaku ekonomi adalah bagian dari tindakan dan kondisi sosial, serta lembaga-lembaga ekonomi adalah konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi, ciri dari bentuk ekonomi yang *embedded* tidak mementingkan perdagangan dan mekanisme pasar dibandingkan dengan motivasi dalam berinteraksi. Tingkat kehidupan yang lebih baik di bidang ekonomi, diandaikan dapat terlaksana apabila ekonomi yang *embedded* dalam kebudayaan berhasil menuju ke bentuk ekonomi *disembedded* yang berhubungan dengan pasar.

⁷ Dualisme dalam ekonomi seperti ini juga dikenal dalam pemikiran Clifford Geertz (1976) sebagai ekonomi bazar dan ekonomi firma.

Di Samigaluh, semua sektor pertanian adalah ekonomi *embedded*; sawah dengan bentuk sistem *glidik* yang melingkar. Lingkaran dalam adalah keluarga, orang sepedukuhan, orang sedesa, baru orang lain, belum lagi dukungan upacara dengan sistem kepercayaan tertentu, jelas ini adalah bentuk dari ekonomi *embedded* yang dijalankan tanpa sistem upah yang jelas. Gula Jawa dikerjakan oleh keluarga *batih*, khususnya gula aren dengan segala bentuk kepercayaan yang dianut oleh pembuatnya (percaya bahwa pohon aren adalah pohon keberuntungan yang tidak bisa ditanam, tidak boleh menerima bayaran dari warung kalau gula belum terjual habis, ada hari-hari tertentu untuk menyadap niranya, batang pohon juga harus dipukul dengan cara tertentu dsb. Semua ini jelas menunjukkan bentuk produksi (ekonomi) *embedded*.

Hal yang sama terjadi pada ekonomi *embedded* di sektor non-pertanian, khususnya industri rumah tangga (pembuatan *slondok*, *geblek* dan *tempe*). Pekerjaan di sektor ini dilakukan oleh keluarga *batih*, pemasarannya di sekitar rumah, tempat produksi. Di pasar, kalau pasar itu tidak jauh atau di warung, dan pesanan sangat digemari karena biasanya dalam jumlah besar.

Apa yang tampak dari kondisi perekonomian di Samigaluh adalah ekonomi *embedded* masih cukup jauh untuk bisa berkembang menuju ke ekonomi yang *disembedded*. Kalau peningkatan ekonomi diandaikan berjalan apabila bentuk ekonomi yang *embedded* ini menuju ke ekonomi pasar, maka realitas memperlihatkan bahwa ekonomi yang *embedded* tidak menunjukkan jalan ke arah ekonomi yang *disembedded*. Berarti perubahan ekonomi sulit dicapai.

6. Sikap Terhadap Kebijakan dan Program

Perlu diperhatikan sikap masyarakat dan para *mboten gadah* saat dihadapkan pada kebijakan dan program yang secara formal digulirkan oleh pemerintah. Apapun nama program dan kebijakan pemerintah yang meluncur ke pedesaan, umumnya mengatasnamakan upaya pengentasan kemiskinan. Upaya ini mengandung dua kesan; yaitu pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengentaskan kemiskinan, dan masyarakat pedesaan adalah kelompok miskin yang harus dibantu.

Sehubungan dengan hal itu, dapat dimengerti kalau banyak orang yang mengaku miskin saat berhubungan dengan kebijakan dan program ini. Selain itu, uang hasil BLT tidak jarang dihabiskan untuk kebutuhan social, misalnya *kondangan*, bahkan ada penerima BLT yang anaknya sudah menunggu di rumah untuk membeli HP, meskipun tidak sedikit pula yang menggunakannya untuk kepentingan rumahtangga. Bagaimana pun penerima BLT tidak memperhatikan nilai tambah. Sehingga di Sidoharjo ada istilah lain untuk menyebut BLT, yaitu “Bantuan Langsung *Telas*” (*telas* berarti habis).

Banyak orang yang bukan penerima BLT merasa bahwa dirinya tidak mempunyai kehidupan yang lebih baik dari rekannya yang menerima BLT. Hal itu lah yang menyebabkan bagi bukan penerima BLT, BLT sering dianggap sebagai bukan rejekinya. Hanya saja, apabila ada kerja bakti, kelompok yang tidak menerima bantuan sering bergumam dengan mengatakan bahwa penerima BLT seharusnya yang kerja bakti, karena mereka sudah menerima bantuan uang. Meskipun demikian, sampai penelitian ini ditulis, belum pernah ada konflik fisik.

Akan halnya Raskin sering dibagi rata dengan tetangga. Artinya, tetangga membeli dengan mengganti harga yang diterima penerima Raskin. Di sini aspek kebersamaan itu menonjol, tetapi tidaklah demikian selamanya. Sebab di Dusun Munggang Wetan IV, Banjarsari, ada penerima Raskin yang menjadi pengumpul. Ia terima pula Raskin dari masyarakat, yang tidak suka akan beras itu, menjualnya pada pengumpul dan akan membeli lagi beras dengan kualitas

di atas Raskin. Pengumpul tentunya akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.

7. Studi Antropologi Dalam Studi Kemiskinan

Ke lima hal tersebut di atas dan beberapa kasus sebagai contoh praktis dapat member gambaran apa yang telah dilakukan oleh Antropologi dalam studi kemiskinan. Studi tersebut memperlihatkan bahwa (i) konsep diri tentang *mboten gadah* bersifat multi interpretatif. Terlihat misalnya bahwa tidak semua penerima BLT dan Raskin merasa masuk dalam kelompok *mboten gadah*, karena mereka mempunyai *keprigelan*, atau seseorang masuk dalam katagori *mboten gadah* padahal lahannya di atas 1 ha.

Dengan demikian,

- kemiskinan tidak ditanggapi sebagai ciri identitas, tetapi hanya sebagai atribut instrumental untuk mendapatkan sesuatu. (Misalnya dalam kasus BLT dan Raskin)

(ii) ada hubungan di antara kegiatan ekonomi dengan orientasi *negoro*. Masyarakat petani dengan orientasi *negoronya* akan bertumpu pada sawah pertanian, meskipun mereka juga mengerjakan pekerjaan lain dalam memenuhi kebutuhannya.

Dengan demikian,

- usaha mengurani laju kemiskinan memerlukan diferensiasi pendekatan yang didasarkan pada perbedaan ekologi ekonomi masyarakat setempat. Artinya, lingkungan ekonomi yang berbeda memerlukan pendekatan yang berbeda

(iii) lembaga tradisi tidak hanya menjamin eksistensi masyarakat miskin, tetapi sekaligus juga memiliki potensi untuk mereproduksi kemiskinan itu sendiri.

Jadi

- pendekatan apa pun yang diterapkan harus memperhitungkan ambivalensi dalam akibat yang lahir dari pendekatan tersebut, dan apa yang harus dilakukan untuk memperkecil ambivalensi tersebut. Berarti, kemungkinan satu pendekatan untuk mereproduksi kemiskinan harus diperkecil sedangkan kemampuannya untuk mereduksi kemiskinan harus diperkuat

Ketiga hal pokok tersebut di atas dapat mengantarkan kita pada suatu hipotesa bahwa;

Usaha untuk mengurangi laju kemiskinan semakin berpotensi untuk berhasil kalau (i) kemiskinan ditanggapi sebagai ciri identitas yang dapat dan perlu diubah, (ii) kalau pendekatan yang diterapkan menjawab tantangan-tantangan kemiskinan yang bersifat khas untuk suatu lingkungan ekonomi, (iii) kalau kemungkinan suatu pendekatan untuk mengalami suatu ambivalensi dalam akibat yang diciptakannya dapat dikurangi, dan akibat yang dikehendaki dapat didorong secara terencana.

Studi Antropologi tentang kemiskinan seperti tersebut di atas, jelas terbedakan dari disiplin ilmu-ilmu lain, seperti kependudukan, ekonomi, politik dsb. Studi semacam ini dapat membantu para pembuat kebijakan dan program untuk memberi wawasan tentang kemiskinan dan orang miskin sehingga tidak terjadi salah sasaran. Antropologi yang mempelajari orientasi (dalam kasus ini adalah *negoro*) dengan perilaku ekonomi masyarakatnya, jelas memperlihatkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang digulirkan secara nasional tanpa memperhatikan deferensiasi kebudayaan seperti yang terjadi saat ini, boleh dikata jauh dari keberhasilan. Selain itui, studi Antropologi juga dapat mempelajari lembaga tradisi yang memproduksi kemiskinan tetapi sekaligus juga mereduksi kemiskinan. Sehingga kalau kita membuat kebijakan dan program harus mengerti betul, bagian mana dari lembaga tradisi itu yang dapat mereduksi kemiskinan, dan di sana lah kebijakan dan program itu harus dikembangkan